**OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM DIGITALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH STUDI KASUS PROVINSI RIAU**

**Syifa Andani1**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

**Latar Belakang**

Dalam era transformasi digital yang berkembang pesat, pemerintah daerah di seluruh Indonesia dituntut untuk beradaptasi dengan sistem administrasi berbasis teknologi. Tahun 2024 menjadi titik penting dalam akselerasi digital di sektor publik, seiring dengan arahan nasional untuk memperkuat penerapan Electronic-Based Government System (SPBE) dan memperluas integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Digitalisasi perencanaan dan penganggaran menjadi prioritas utama dalam mendorong efektivitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi.

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan utama adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang berfungsi sebagai tulang punggung pengelolaan data, perencanaan, hingga pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hasil studi Kemendagri (2024), lebih dari 80% pemerintah daerah telah mulai menerapkan e-Planning dan e-Budgeting, dua komponen utama dari SIM di sektor publik. Namun, capaian tersebut tidak sepenuhnya merata, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan integrasi lintas sistem.

Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin menekankan pentingnya digitalisasi administrasi publik. Salah satu instrumen utama yang terus dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang berperan dalam mengelola proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemerintah secara terintegrasi dan berbasis data.

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2024 mencatat bahwa tingkat implementasi SIM dalam mendukung tata kelola pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan perluasan penggunaan platform e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev di berbagai daerah, termasuk pada level provinsi, kabupaten, dan kota. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Sistem Informasi Daerah dari Bappenas (2024), Provinsi Riau termasuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kesiapan tinggi dalam penerapan sistem informasi pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah mengembangkan serta mengintegrasikan beberapa sistem aplikasi pendukung seperti Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), e-Planning, dan e-Budgeting. Penggunaan SIM dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah memberikan kemudahan dalam hal konsistensi data, efisiensi waktu pengolahan, serta keterlacakan kegiatan secara daring.

Namun, di tengah peningkatan tersebut, masih ditemukan sejumlah tantangan teknis dan kelembagaan. Studi oleh Siregar et al. (2024) menyebutkan bahwa terdapat ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, keterbatasan dalam integrasi antarsistem, rendahnya interoperabilitas antar platform digital, serta terbatasnya infrastruktur teknologi di wilayah kabupaten tertentu menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan SIM.

Lebih lanjut, laporan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2024 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui platform digital di Provinsi Riau masih bersifat administratif dan belum substantif. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi, namun tidak semua informasi tersebut mudah dipahami atau dikonversi menjadi masukan kebijakan yang relevan.

Berdasarkan realitas tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana Sistem Informasi Manajemen digunakan dalam mendukung proses digitalisasi perencanaan dan penganggaran publik di Provinsi Riau. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis efektivitas sistem yang sudah diterapkan, sejauh mana integrasi antar aplikasi dapat berjalan optimal, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan publik dan transparansi anggaran.

**Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggali secara mendalam implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam proses digitalisasi perencanaan dan penganggaran publik di Provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena ingin mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana SIM dioperasikan, manfaat yang dirasakan, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku di lapangan. Penelitian difokuskan pada dua daerah yang mewakili tingkat kemajuan digital yang berbeda, yaitu Kota Pekanbaru sebagai daerah perkotaan dengan akses teknologi relatif baik, dan Kabupaten Kampar yang memiliki karakteristik wilayah semi-perkotaan dan perdesaan dengan keterbatasan infrastruktur.

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci yang terdiri dari pejabat teknis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Keuangan Daerah. Wawancara semi-terstruktur ini berfokus pada proses pelaksanaan SIM, mulai dari input data perencanaan hingga penganggaran, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif dalam forum musrenbang tingkat kecamatan yang menggunakan sistem digital, untuk memahami langsung mekanisme penggunaan SIM dalam pengambilan keputusan publik. Dokumentasi juga dikumpulkan dalam bentuk laporan tahunan, hasil evaluasi internal, dan data dari portal e-Planning serta e-Budgeting sebagai data sekunder. Untuk memperkuat analisis, data lapangan ini kemudian dibandingkan dan dianalisis secara tematik bersama dengan literatur pendukung berupa jurnal dan laporan kebijakan terbaru tahun 2024.

Analisis data dilakukan secara berlapis, dimulai dengan transkripsi wawancara, pengkodean tematik untuk menemukan pola dan tema utama seperti efektivitas SIM, transparansi, partisipasi masyarakat, serta tantangan teknis dan kelembagaan. Seluruh temuan dianalisis dengan membandingkan data primer dan sumber sekunder untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi implementasi SIM di Provinsi Riau.

Studi kasus di Provinsi Riau menggambarkan bagaimana digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Informasi Manajemen mulai diimplementasikan secara nyata, terutama di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Di Kota Pekanbaru, SIM sudah digunakan secara penuh dalam proses perencanaan dan penganggaran sejak tahun 2022. Melalui wawancara dengan pejabat Bappeda, terungkap bahwa penggunaan aplikasi e-Planning mempermudah penyusunan dokumen RKPD karena seluruh tahapan mulai dari musrenbang desa hingga validasi tingkat provinsi dapat dilakukan secara daring. Hal ini berdampak positif pada peningkatan efisiensi administrasi, karena waktu penyusunan RKPD dipangkas hampir 30% dibandingkan dengan cara manual sebelumnya. Selain itu, staf operator sistem mengakui bahwa kemudahan pelacakan dan pengelolaan data usulan program mampu mengurangi kesalahan administratif yang sering terjadi

Namun, pengumpulan data dari Kabupaten Kampar menunjukkan tantangan yang lebih kompleks. Meskipun e-Planning sudah diterapkan, integrasi dengan sistem e-Budgeting belum berjalan mulus. Operator SIM di Kampar mengungkapkan bahwa sistem yang berbeda antar OPD menyebabkan penginputan data dilakukan secara berulang, sehingga menambah beban kerja dan potensi ketidaksesuaian data. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi operator sistem menjadi kendala utama dalam pemanfaatan fitur-fitur SIM secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan disparitas dalam kualitas dan kelengkapan data perencanaan yang berdampak pada proses penganggaran.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspek Implementasi** | **Kota Pekanbaru (%)** | **Kabupaten Kampar (%)** |
| Penggunaan e-Planning | 90 | 75 |
| Integrasi e-Planning & e-Budgeting | 80 | 55 |
| Pelatihan Operator SIM | 70 | 40 |
| Ketersediaan Infrastruktur IT | 85 | 60 |
| Partisipasi Masyarakat melalui SIM | 60 | 35 |

Sedangkan ini data usulan yang masuk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lokasi** | **Total Usulan** | **Usulan Masuk Prioritas** | **Persentase (%)** |
| Kota Pekanbaru | 150 | 40 | 26.7 |
| Kabupaten Kampar | 120 | 18 | 15 |

Transparansi yang dihadirkan oleh SIM di Pekanbaru cukup signifikan. Pemerintah daerah membuka akses publik terhadap informasi perencanaan dan anggaran melalui portal dashboard yang dapat diakses masyarakat. Masyarakat dan media dapat memantau usulan program serta realisasi anggaran secara langsung, sehingga memunculkan peluang pengawasan dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa peserta musrenbang dan LSM lokal menunjukkan bahwa akses informasi belum diikuti dengan peningkatan pemahaman dan partisipasi yang efektif. Sebagian masyarakat, terutama di daerah pinggiran, mengalami keterbatasan literasi digital dan akses internet yang menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan penggunaan SIM sebagai ruang dialog publik.

Partisipasi masyarakat melalui fitur digital juga masih terbatas. Data dari forum musrenbang online di Kampar memperlihatkan bahwa meskipun aspirasi masyarakat bisa diajukan secara digital, realisasinya dalam dokumen RKPD masih rendah. Hanya sekitar 12-15% dari usulan masyarakat yang masuk dalam prioritas program pemerintah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses teknologi, kurangnya sosialisasi, serta budaya partisipasi yang masih lemah di masyarakat pedesaan. Bahkan, ada beberapa wilayah yang masih mengandalkan musrenbang tatap muka dan penginputan data dilakukan oleh operator secara manual, sehingga SIM berfungsi lebih sebagai media dokumentasi daripada alat partisipasi interaktif.

Dari sisi teknis, analisis menyimpulkan bahwa integrasi sistem antar OPD di Provinsi Riau belum optimal. Fragmentasi aplikasi dan perbedaan format data menyebabkan ketidaksesuaian dan ketergantungan pada input manual yang berulang. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi operator SIM menghambat pemanfaatan fitur canggih seperti pelaporan real time dan monitoring anggaran. Keterbatasan infrastruktur jaringan terutama di daerah perbatasan juga menjadi hambatan signifikan. Di samping itu, perubahan regulasi yang cepat dari pusat sering tidak diikuti dengan kesiapan teknis dan kebijakan di tingkat daerah, sehingga menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

Secara keseluruhan, studi kasus di Riau menggambarkan bahwa penerapan SIM dalam proses perencanaan dan penganggaran mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi birokrasi. Namun, keberhasilan sistem ini masih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor yang baik. Untuk itu, diperlukan strategi pelatihan berkelanjutan, penyederhanaan sistem agar lebih user friendly, dan penguatan integrasi antar platform untuk memastikan SIM menjadi instrumen transformasi digital yang mampu membawa perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah

**Kesimpulan dan Rekomendasi**

Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah. Penggunaan SIM secara digital mempersingkat waktu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan memperbaiki akurasi data, khususnya di Kota Pekanbaru yang memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih memadai. Namun, di Kabupaten Kampar, kendala seperti keterbatasan infrastruktur IT, pelatihan operator yang belum memadai, dan kurangnya integrasi sistem antar perangkat daerah menghambat optimalisasi pemanfaatan SIM.

Selain itu, meskipun SIM membuka akses publik terhadap informasi perencanaan dan anggaran, partisipasi masyarakat melalui platform digital masih terbatas, terutama di daerah dengan akses internet dan literasi digital yang rendah. Hal ini menandakan bahwa SIM saat ini lebih berfungsi sebagai alat administrasi internal dibanding sebagai media partisipasi publik yang aktif.

Secara keseluruhan, SIM di Provinsi Riau telah menjadi instrumen penting dalam transformasi digital pemerintahan, namun keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Infrastruktur** | **Ketersediaan Saat Ini (%)** | **Kebutuhan Ideal (%)** | **Kesenjangan (%)** |
| Komputer dan Server | 75 | 100 | 25 |
| Jaringan Internet Stabil | 65 | 95 | 30 |
| Perangkat Lunak Terintegrasi | 55 | 90 | 35 |
| Sistem Keamanan Data | 50 | 85 | 35 |
| Pelatihan SDM TI | 40 | 90 | 50 |

Dari data di ada menunjukkan bahwa perlunya perbikan dan penambahan inventaris.

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur IT terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan agar SIM dapat diakses secara merata oleh seluruh OPD dan masyarakat.

1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM

Pelatihan berkelanjutan bagi operator SIM dan aparatur daerah perlu diintensifkan agar mereka mampu memanfaatkan fitur-fitur SIM secara optimal, termasuk integrasi sistem dan pelaporan real-time.

1. Integrasi Sistem yang Lebih Baik

Pengembangan dan standardisasi sistem SIM antar OPD harus dilakukan agar terjadi interoperabilitas yang lancar, sehingga data tidak perlu diinput berulang dan kesalahan data dapat diminimalkan.

1. Sosialisasi dan Literasi Digital bagi Masyarakat

Program sosialisasi dan peningkatan literasi digital masyarakat harus dijalankan, terutama di daerah perdesaan, agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran melalui SIM dapat meningkat.

1. Pengembangan Fitur Partisipasi Publik

SIM harus dikembangkan menjadi platform interaktif yang tidak hanya menyediakan data, tetapi juga memfasilitasi dialog dan pengajuan usulan secara online dengan proses transparan dan responsif.

1. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi SIM untuk mengidentifikasi hambatan, menilai kinerja sistem, dan melakukan perbaikan secara tepat waktu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bappenas. (2024). Laporan Evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kemendagri. (2024). Capaian Implementasi e-Planning dan e-Budgeting di Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian PAN-RB. (2024). Indeks SPBE dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

LAN RI. (2024). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (2018).

Siregar, R., Andriani, N., & Zulkifli, H. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Administrasi Publik Digital, 12(1), 44–56.

Yuliana, D., & Nasution, F. (2024). Digitalisasi Birokrasi dan Tantangan Interoperabilitas Sistem Informasi di Daerah. Jurnal Inovasi Administrasi Daerah, 8(2), 65–80.

Fitri, M., & Hidayat, A. (2024). Integrasi e-Planning dan e-Budgeting dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Jurnal Tata Kelola dan Inovasi Publik, 9(1), 27–40.

Kurniawan, T. (2024). Kapasitas SDM dan Efektivitas SIM di Pemerintah Kabupaten. Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, 7(3), 98–112.

Nasution, R., & Putri, L. (2024). Partisipasi Digital Masyarakat dalam Musrenbang Online: Studi di Riau. Jurnal Pembangunan Daerah, 5(1), 33–47.